



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



**INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 dan dokumen ini akan menjadi salah satu pedoman bagi seluruh aparatur pada Inspektorat Provinsi Lampung dalam menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2021.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat menghargai setiap masukan-masukan positif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.

Bandar Lampung,

2020

INSPEKTUR,




ADI ERLANSYAH, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640214 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB. I PENDAHULUAN		1
1. Latar		1
1.1. Belakang.....		1
1.2. Landasan		2
2. Hukum.....		2
1.3. Maksud dan		3
3. Tujuan.....		3
1.4. Sistematika		4
4. Penulisan.....		4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT		6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan		6
1.1.1. Capaian Renstra Periode 2015-2019 dan Periode 2019		6
-2024.....		6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan		6
2.2.1. Inspektorat.....		6
2.2.1.1. IKU pada Renstra 2015 -		7
2019.....		7
2.2.1.2. IKU pada Renstra 2019 -		14
2024.....		14
2.2.1.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian		15
Kinerja.....		15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi		17
3. Inspektorat.....		17
2.4. Review Terhadap RKPD		18
4. 2021.....		18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku		19
5. Kepentingan		19
Pembangunan.....		19
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN		20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		20
1.1.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat		20
2.1.1.2. Program dan Kegiatan		21
3.1.1.3. Program dan Kegiatan		21

BAB. IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	24
BAB. V PENUTUP	27

BAB. I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Inspektorat Provinsi Lampung merupakan rencana kerja pada tahun pertama dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Dengan demikian dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 nantinya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019 - 2024.

Dokumen rencana kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman kerja bagi Aparatur di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga target kinerja yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik.

Selain sebagai pedoman kerja, dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pada periode-periode tertentu dan dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahun 2021 Inspektorat Provinsi Lampung ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2019-2024 Inspektorat Provinsi Lampung.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan

datang pula, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Inspektorat Provinsi Lampung ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 Inspektorat Provinsi Lampung ini memuat informasi mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Selain itu rencana kerja juga memuat indikator kinerja, lokasi kegiatan, target capaian kinerja, kebutuhan dana serta prakiraan maju rencana anggaran tahun 2021.

Dengan uraian diatas diharapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2021 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-

sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2021 ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi RENJA Inspektorat Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2019-2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Pembangunan

Bab III Tujuan dan Sasaran

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat
- 3.3 Rumusan Program dan Kegiatan

Bab IV Rancangan Program dan Kegiatan

- 4.1 Matrik/ Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Lokasi, Indikator, Target, dan Prakiraan Maju
- 4.2 Matrik Hasil Pemetaan Nomenklatur mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Bab V Penutup

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian Renja terhadap RENSTRA Periode 2015-2019 dan Periode 2019-2024

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2020, serta progres pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2015-2019 dan RENSTRA Periode 2019-2024 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 pada umumnya realisasi program/kegiatan secara umum telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2020 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2020 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2019-2024, dikarenakan Pelaksanaan Rencana Kerja 2020 masih dalam tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Hasil pengukuran kinerja selama tahun 2019 Inspektorat Provinsi Lampung dalam pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Lampung

dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Renstra 2015 - 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung pada Renstra 2015 - 2019 :

1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan.
2. Persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan sesuai aspek pembinaan dan pengawasan.
3. Persentase SKPD dengan tingkat maturitas pada level 3.

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut, untuk tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2019 diperoleh data tindaklanjut tunggakan terhadap hasil pemeriksaan reguler Tahun 2018 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 301 rekomendasi atau sebesar 71,84 %, sedangkan tindaklanjut tunggakan hasil pemeriksaan berkala Tahun 2018 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 559 rekomendasi atau sebesar 71,48%, sehingga secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2019 tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 860 rekomendasi atau sebesar 71,60%.

Tabel 2.1 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2019 (Januari s/d Desember)

No	Uraian	Jumlah Temuan	Sisa Rekomendasi yang belum TL Per 1 Januari 2019	Dalam Proses	TL yang Selesai	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2018	419	114	4	301	71,84

2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2018	782	219	4	559	71,48
Jumlah		1201	333	8	860	71,60

Dari data diatas dapat kita lakukan pemilahan sesuai dengan periode jabatan masa kepemimpinan Gubernur, diperoleh untuk periode Januari sampai dengan September, tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan reguler Tahun 2018 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 285 rekomendasi atau sebesar 68,02 %, sedangkan tindaklanjut hasil pemeriksaan berkala Tahun 2018 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 317 rekomendasi atau sebesar 40,54%, sehingga secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan September tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 602 rekomendasi atau sebesar 50,12%.

Tabel 2.2 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2019 (Januari s/d September)

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Sisa Rekomendasi yang belum TL Per 1 Januari 2019	Dalam Proses	TL yang Selesai	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2018	419	134	0	285	68,02
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2018	782	465	0	317	40,54
Jumlah		1.201	599	0	602	50,12

Untuk periode September sampai dengan Desember, tindaklanjut tunggakan terhadap hasil pemeriksaan reguler

Tahun 2018 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 16 rekomendasi atau sebesar 3,81 %, sedangkan tindaklanjut tunggakan hasil pemeriksaan berkala Tahun 2018 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 242 rekomendasi atau sebesar 30,95%, sehingga secara keseluruhan pada periode September sampai dengan Desember tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 258 rekomendasi atau sebesar 21,48%.

Tabel 2.3 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Tunggakan Tahun 2019 (September s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Sisa Rekomendasi yang belum TL Per 1 Januari 2019	Dalam Proses	TL yang Selesai	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2018	419	114	4	16	3,81
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2018	782	219	4	242	30,95
Jumlah		1201	333	8	258	21,48

Untuk hasil tindaklanjut hasil pemeriksaan reguler Tahun 2019 yang berhasil diselesaikan selama periode Januari sampai Desember Tahun 2019 adalah sebesar 373 rekomendasi atau sebesar 96,88%, dan untuk tindaklanjut hasil pemeriksaan berkala Tahun 2019 yang berhasil diselesaikan adalah sebesar 330 rekomendasi atau sebesar 89,92%, sehingga secara keseluruhan periode Januari s/d Desember tindaklanjut yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 703 rekomendasi atau sebesar 93,48%.

Tabel 2.4 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2019 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	TL	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2019	385	373	96,88
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2019	367	330	89,92
Jumlah		752	703	93,48

Dari data diatas dapat dilakukan pemilahan sesuai dengan jabatan masa kepemimpinan Gubernur, diperoleh untuk periode Januari sampai dengan September, tindaklanjut hasil pemeriksaan reguler Tahun 2019 yang berhasil diselesaikan adalah sebesar 290 rekomendasi atau sebesar 76,92%, dan untuk tindaklanjut hasil pemeriksaan berkala Tahun 2019 yang berhasil diselesaikan adalah sebesar 218 rekomendasi atau sebesar 65,86%, sehingga secara keseluruhan periode Januari s/d September tindaklanjut yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 508 rekomendasi atau sebesar 71,75%.

Tabel 2.5 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2019 (Januari s/d September)

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	TL	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2019	377	290	76,92
2	Pemeriksaan	331	218	65,86

	n Berkala Tahun 2019			
	Jumlah	708	508	71,75

Untuk periode September sampai dengan Desember, tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan reguler Tahun 2019 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 83 rekomendasi atau sebesar 21,56 %, sedangkan tindaklanjut hasil pemeriksaan berkala Tahun 2019 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 112 rekomendasi atau sebesar 30,52%, sehingga secara keseluruhan pada periode September sampai dengan Desember tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 195 rekomendasi atau sebesar 25,93%

Tabel 2.6 Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2019 (September s/d Desember 2019)

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	TL	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2019	385	83	21,56
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2019	367	112	30,52
	Jumlah	752	195	25,93

Dari uraian data pada tabel 2.1 dan 2.4 di atas dapat dihitung kinerja Inspektorat pada indikator Hasil Audit APIP yang terselesaikan periode Januari sampai Desember adalah

jumlah tindaklanjut yang selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali x 100% = $((860+703)/ (1201+752)) \times 100\% = 80,03\%$.

Untuk menghitung persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas sesuai aspek pembinaan dan pengawasan pada Tahun 2019 periode Januari sampai Desember adalah menggunakan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berupa data rekomendasi (01) potensi kerugian negara/daerah dan rekomendasi (02) kewajiban setor negara/daerah :

Tabel 2.7 Kerugian Negara/ Daerah dan Kewajiban Setor Negara/ Daerah Tahun 2017 sampai 2019 (periode Januari s/d Desember)

No.	Tahun Pemeriksaan	Kerugian Negara/ Daerah (Rp)	Kewajiban Setor Negara/ Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2019	24.445.124	102.648.538	127.093.662
2.	2018	674.999.992	815.900	675.815.892
3.	2017	81.273.813,45	43.359.152	124.632.965,45

Dari data pada tabel 2.7 diperoleh dari hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019, berdasarkan data tersebut besar Persentase Pelanggaran Terhadap Standar Atas Pelaksanaan Tugas Sesuai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2019 adalah perbandingan jumlah rekomendasi 01 dan 02 Tahun

2019 dibagi dengan jumlah rekomendasi 01 dan 02 Tahun 2019 x 100% = (127.093.662/675.815.892) x 100% = **18,81%**.

Berdasarkan data diatas dapat lakukan pemilahan sesuai dengan jabatan masa kepemimpinan Gubernur, pada periode Januari sampai dengan September ditunjukkan dalam Tabel 2.8 diperoleh dari hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung periode Januari sampai September Tahun 2019 dapat dihitung persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas sesuai aspek pembinaan dan pengawasan periode Januari sampai September Tahun 2019 adalah perbandingan jumlah rekomendasi 01 dan 02 Tahun 2019 pada periode Januari sampai September dibagi dengan jumlah rekomendasi 01 dan 02 Tahun 2019 periode Januari sampai September x 100% = (24.445.124/675.815.892) x 100% = 3,61%

Tabel 2.8 Kerugian Negara/ Daerah dan Kewajiban Setor Negara/ Daerah Tahun 2019 (Januari s/d September 2019)

No.	Tahun Pemeriksaan	Kerugian Negara/ Daerah (Rp)	Kewajiban Setor Negara/ Daerah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2019	24.445.124	0	24.445.124
2.	2018	674.999.992	815.900	675.815.892
3.	2017	81.273.813,45	43.359.152	124.632.965,45

Pada pelaksanaan pengukuran Sistem Pengendalian Internal pada Tahun 2019 Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari sampai dengan Desember telah melakukan pengukuran/ evaluasi terhadap maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah/ Unit Kerja sebanyak 21 (dua puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Unit Kerja. Dari jumlah tersebut terdapat 17 (tujuh belas) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau **80,95%** yang memperoleh nilai maturitas pada level 3.

Tabel 2.9 Prosentase OPD dengan Tingkat Maturitas Level 3

No.	Tahun	Jumlah OPD	OPD dengan Tingkat Maturitas Level 3	Prosentase
1	2019	21	17	80,95

Dari uraian diatas dapat disimpulkan capaian Inspektorat Provinsi Lampung pada Tahun 2019 berdasarkan dokumen perencanaan Renstra Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Target dan Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 berdasarkan Renstra 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian 2019
1.	Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan	80%	80,03%
2.	Persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan sesuai aspek pembinaan dan pengawasan	20%	18,81%

3.	Persentase SKPD dengan tingkat maturitas pada level 3	80%	80,95%
----	---	-----	--------

2.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Renstra 2019 - 2024

Berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Inspektorat yaitu :

1. Persentase temuan selesai ditindaklanjuti
2. Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti
3. Indeks SPIP

Tabel 2.11 Target Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung
Tahun 2019 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase temuan selesai ditindaklanjuti	80%	82%	84%	86%	88%
2	Persentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indeks SPIP	3,02	3,04	3,06	3,08	3,10

Pada tahun 2019 data pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Provinsi Lampung dan selesai ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari s/d Desember adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti
Tahun 2019 (Januari s/d Desember)

No.	Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Tindaklanjuti Pengaduan	Prosentase
-----	-------	------------------	--------------------------------	------------

	2019	Yang Masuk	Masyarakat Selesai	
1	Urbanwil I	8	8	100
2	Urbanwil II	6	6	100
3	Urbanwil III	8	8	100
4	Urbanwil IV	6	6	100
Jumlah		28	28	100

Untuk indeks Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan pengukuran Tahun 2019 pada 21 (dua puluh satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diperoleh rata-rata indeks sebesar 2,67.

Tabel 2.13 Indeks SPIP pada OPD Tahun 2019

No.	Periode Pemeriksaan	Jumlah OPD	Indeks
1	Januari s/d Desember Tahun 2019	21	2,67

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data-data yang ada diperoleh capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 2.14 Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019
1.	Persentase temuan selesai ditindaklanjuti	80,03
2.	Persentase pengaduan masyarakat selesai	100
3.	Indeks SPIP	2,67

2.2.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

a. Renstra 2015 - 2019

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung pada Renstra 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15 Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2015 -2019

No	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
1.	Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan	40	87	50	71	60	81	70	71,54	80	80,03
2.	Persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas sesuai aspek pembinaan dan pengawasan	60	51,89	50	50,28	40	72,7	30	45,23	20	18,81
3.	Persentase SKPD dengan tingkat maturitas pada level 3	40	45	50	50	60	76	70	86,36	80	80,95

Berdasarkan Tabel 2.15 dapat diketahui bahwa untuk Capaian indikator persentase hasil audit APIP yang terselesaikan Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan maka capaian Tahun 2019 masih dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan pada saat laporan ini disusun terdapat tindak lanjut rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian.

Untuk indikator persentase pelanggaran terhadap standar atas pelaksanaan tugas sesuai aspek pembinaan dan pengawasan selama Tahun 2019 capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tingkat maturitas pada level 3 capaian yang diperoleh jauh dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini kemungkinan disebabkan karena faktor pergantian pimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Renstra 2019 - 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan pada dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Lampung 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16 Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
1.	Persentase temuan selesai ditindaklanjuti	80	80,03	80	-	82	-	84	-	86	-	88	-
2.	Persentase pengaduan masyarakat selesai	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
3.	Indeks SPIP	3,00	2,67	3,02	-	3,04	-	3,06	-	3,08	-	3,10	-

Dari Tabel 2.16 diketahui bahwa untuk indikator persentase temuan selesai ditindaklanjuti capaian Tahun 2019 berada dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan

karena pada saat laporan ini disusun masih terdapat temuan/rekomendasi yang masih dalam proses penyelesaian. Untuk indikator prosentase pengaduan masyarakat yang selesai pada Tahun 2019 capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk indikator indeks SPIP Tahun 2019 capaiannya masih berada dibawah target yang telah ditetapkan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal
 - a. Kompetensi sumber daya manusia baik Auditor maupun P2UPD.
 - b. Dukungan sarana dan prasarana.
2. Faktor Eksternal
 - a. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk pengawasan, akuntabilitas dan profesionalitas dalam aspek pembinaan dan pengawasan.
 - b. Pentingnya mewujudkan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Peran APIP (melalui audit, reuiu, monitoring, evaluasi, consulting dan pelaksanaan binwas lainnya)
3. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Kepala Daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD 2021

RKPD 2021 sampai dengan saat RENJA 2021 ini disusun belum diterbitkan, sehingga kami tidak dapat melakukan review atas RKPD 2021.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Lampung tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Namun demikian keinginan masyarakat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik direspon melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 yang menjadi pedoman Inspektorat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan, selain itu juga dengan melaksanakan implementasi Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH terkait dengan pengaduan masyarakat.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Undang-undang 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu kebijakan nasional yang perlu didukung, dan Inspektorat sebagai perangkat daerah bertugas membantu kepala daerah untuk mengawal dan mensukseskan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui program-program pembinaan dan pengawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang menjadi tujuan utama Inspektorat Provinsi Lampung adalah ***“Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan”***, dengan indikator keberhasilannya adalah Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu

yang lebih pendek. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2024 adalah **Meningkatnya Kinerja Keuangan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan.

3.3 Program dan Kegiatan

Inspektorat Provinsi Lampung dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2020 telah menetapkan 7 Program dengan 33 Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - f. Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 3. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset perangkat daerah**
- a. Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan
- 4. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
- a. Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan
 - b. Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/ Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah I.
 - c. Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/ Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah II.
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/ Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah III.
 - e. Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/ Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah IV.
 - f. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah I.
 - g. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah II.
 - h. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah III.
 - i. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah IV.
 - j. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- k. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/ Kota
 - l. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
5. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan
 - a. Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Komperhensif.
 - b. Peningkatan Koordinasi dan Pendampingan dalam mewujudkan Sinergitas Pengawasan.
 6. Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan pada Obyek Pengawasan.
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
 - b. Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - c. Kegiatan Pembinaan Gratifikasi dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi.
 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Seluruh program dan kegiatan di atas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Gubernur Lampung sebagai kepala daerah khususnya pada Misi kedua yaitu *Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik*, selain itu program dan kegiatan pada Inspektorat juga mengawal pencapaian janji kerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB. IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Inspektorat Provinsi Lampung dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2021 menetapkan 7 Program dengan 33 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - f. Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 3. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset perangkat daerah**

- a. Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan
4. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- a. Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan
 - b. Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/ Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah I.
 - c. Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/ Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah II.
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/ Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah III.
 - e. Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/ Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah IV.
 - f. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah I.
 - g. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah II.
 - h. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah III.
 - i. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah IV.
 - j. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - k. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/ Kota
 - l. Penangan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
5. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan

- a. Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Komperhensif.
 - b. Peningkatan Koordinasi dan Pendampingan dalam mewujudkan Sinergitas Pengawasan.
6. Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan pada Obyek Pengawasan.
- a. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
 - b. Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - c. Kegiatan Pembinaan Gratifikasi dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi.
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Seluruh program dan kegiatan di atas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Gubernur Lampung sebagai kepala daerah khususnya pada Misi kedua yaitu *Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.*

BAB. V **P E N U T U P**

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2021 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2019-2024. Dalam Rencana Kerja Tahun 2021 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2021 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi aparatur Inspektorat Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya kedepan. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

Selain itu dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya.

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Urusan Pendukung								
5 3	Inspektorat								
5 3 1	Inspektorat								
5.3.1.1	Inspektorat								
5.3.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase kepuasan pelayanan internal			1.816.324.000				2.004.000.000
5.3.1.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Layanan Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		300.000.000
5.3.1.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	• Layanan Administrasi Keuangan	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	430.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		370.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• Pengadaan Atk	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		140.000.000
5.3.1.1.1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• Barang cetak dan penggandaan	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	45.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		112.000.000
5.3.1.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	Inspektorat Prov Lampung	6 bulan	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		220.000.000
5.3.1.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	• Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	54.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		42.000.000
5.3.1.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Kebutuhan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	35.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		36.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	• Kebutuhan makan dan minum rapat	Inspektorat Prov Lampung	52 Kali	170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		114.000.000
5.3.1.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	• Menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Inspektorat Prov Lampung	36 Kali	488.324.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		550.000.000
5.3.1.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	• Periode Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Inspektorat Prov Lampung	12 bulan	84.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		120.000.000
5.3.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor			464.500.000				762.000.000
5.3.1.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Gedung	Inspektorat Prov Lampung	4 unit	60.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		360.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	• Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas	Inspektorat Prov Lampung	13 unit	330.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		360.000.000
5.3.1.1.2.5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	• Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Inspektorat Prov Lampung	14 unit	74.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		42.000.000
5.3.1.1.4	Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	• Prosentase kesesuaian substansi perencanaan dan pelaporan sesuai peraturan			40.000.000				96.000.000
5.3.1.1.4.1	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	• Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Inspektorat Prov Lampung	6 bulan	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		48.000.000
5.3.1.1.4.3	Penyusunan dokumen perencanaan	• Jumlah dokumen perencanaan	Inspektorat Prov Lampung	8 dokumen	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		48.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	• Prosentase Kepatuhan OPD Terhadap Peraturan Yang Berlaku		100 %	6.687.000.000			100 %	8.179.500.000
5.3.1.1.15.1	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	• Persentase Hasil Temuan yang terselesaikan	15 Kabupaten/Kota	82 %	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		750.000.000
5.3.1.1.15.2	Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irbn Wilayah I	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Utara	3 Laporan	450.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		540.000.000
5.3.1.1.15.3	Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irbn Wilayah II	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kabupaten Way Kanan, Pringsewu, Lampung Tengah, Pesawaran	4 Laporan	590.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		590.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.15.4	Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah III	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kabupaten Mesuji, Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung	4 Laporan	520.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		590.000.000
5.3.1.1.15.5	Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah IV	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Kabupaten Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Metro	4 Laporan	590.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		590.000.000
5.3.1.1.15.6	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah I	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Provinsi Lampung	15 Laporan	740.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.020.000.000
5.3.1.1.15.7	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah II	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Provinsi Lampung	15 Laporan	745.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.020.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.15.8	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah III	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Provinsi Lampung	15 Laporan	770.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.149.500.000
5.3.1.1.15.9	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah IV	• Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Provinsi Lampung	15 Laporan	742.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		1.020.000.000
5.3.1.1.15.10	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Evaluasi	15 Kabupaten/Kota	15 Laporan	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		275.000.000
5.3.1.1.15.11	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota	• Jumlah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota yang di Evaluasi	4 Kabupaten/Kota	4 Laporan	90.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		215.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.15.12	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah	• Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Selesai	Provinsi Lampung	100 %	800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		420.000.000
5.3.1.1.17	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	• Persentase Program Kerja Pengawasan Tahunan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku		100 %	2.162.000.000			100 %	2.650.000.000
5.3.1.1.17.1	Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Komperhensif	• Dokumen PKPT	Provinsi Lampung	1 dokumen	162.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		650.000.000
5.3.1.1.17.2	Peningkatan Koordinasi dan Pendampingan dalam mewujudkan Sinergitas Pengawasan	• Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Saber Pungli	Provinsi Lampung	1 Kali	2.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		2.000.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.18	Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	• Rata-rata Indeks/Nilai Maturitas SPIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		3 angka	644.500.000			3 angka	1.095.000.000
5.3.1.1.18.1	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	• Jumlah Pembinaan/Monitoring SPIP	Provinsi Lampung	4 Kali	140.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		216.000.000
5.3.1.1.18.2	Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	• Jumlah Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi	Provinsi Lampung	4 Kali	254.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		574.000.000
5.3.1.1.18.3	Kegiatan Pembinaan Gratifikasi dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	• Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	Tersebar di Provinsi Lampung	3 Kali	250.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		305.000.000
5.3.1.1.19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• Prosentase Aparatur Sipil Yang Mengikuti Diklat dan Memenuhi Standar Kompetensi		37 %	600.000.000			40 %	455.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3.1.1.19.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	• Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Diklat	Tersebar di seluruh Wilayah Indonesia	75 orang	600.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)	null		455.000.000
TOTAL					12.414.324.000				15.241.500.000

**INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG**

NIP.

